

Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjar

Rizky Assodik^{1*}, Regi Refian Garis², Ii Sujai³

¹⁻³ Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jalan RE. Martadinata No 150

Korespondensi email: assodik10@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by several factors that cause voter behavior in the regional head election in Banjar City. The purpose of this study is to determine voter behavior in the Regional Head Election in Banjar City. The method used in this study is descriptive analysis. There are 7 informants. Data collection techniques are literature studies, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through data processing from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the study. Based on the results of the study, it is known that: voter behavior in Banjar City is still dominated by the tendency of traditional voters and skeptical voters. This is evidenced by the problem of many voters who determine their choices based on following suit if most of their environment chooses a candidate pair, in addition, voters in determining their political choices are based on information obtained from their parents or from their environment, there are voters who are reluctant and lazy to pay attention to political contestation. There are obstacles to voter behavior in the regional head election in Banjar City, including unequal access to information so that people only get political information from unverified social media. In addition, the practice of money politics is still a reality that is difficult to avoid, where direct assistance or certain promises are the main considerations in choosing candidate pairs as well as past experiences. To overcome various obstacles, a number of efforts have been made, including the Banjar City General Election Commission (KPU) implementing a voter education program through direct outreach to the community, especially in villages and densely populated areas. The KPU also involves democracy volunteers (relationships) to convey information related to election mechanisms, the vision and mission of candidate pairs, and to conduct socialization regarding the importance of choosing based on programs, not just material enticements by intensifying anti-money politics campaigns through banners, social media, and the involvement of religious and traditional figures. Collaborating with a number of community organizations such as Karang Taruna, youth groups, and higher education institutions in Banjar City in order to build public political awareness so that it can increase voter trust in candidate pairs.*

Keywords: *Voter Behavior, Regional Head Elections*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa faktor yang menyebabkan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : perilaku pemilih di Kota Banjar masih didominasi oleh kecenderungan pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan masih banyaknya pemilih yang menentukan pilihannya didasarkan pada ikut-ikutan jika kebanyakan dilingkungannya memilih pasangan calon, selain itu pemilih dalam menentukan pilihan politiknya didasarkan pada informasi yang diperoleh dari orangtuanya maupun dari lingkungannya, adanya pemilih yang enggan dan malas untuk memperhatikan kontestasi politik. Adanya hambatan-hambatan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar yang antara lain akses informasi yang tidak merata sehingga masyarakat hanya mendapatkan informasi politik dari media sosial yang tidak terverifikasi. Selain itu, praktik politik uang (money politics) masih menjadi realitas yang sulit dihindari, di mana bantuan langsung atau janji tertentu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan calon serta pengalaman masa lalu. Untuk mengatasi berbagai hambatan terdapat sejumlah upaya yang dilakukan antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melaksanakan program pendidikan pemilih melalui penyuluhan langsung ke masyarakat, terutama di desa-desa dan lingkungan padat penduduk. KPU juga melibatkan relawan demokrasi (relasi) untuk menyampaikan informasi terkait mekanisme pemilu, visi-misi pasangan calon, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memilih berdasarkan program, bukan sekadar iming-iming materi dengan menggencarkan kampanye anti-politik uang melalui spanduk, media sosial, dan pelibatan tokoh agama dan adat. Melakukan kolaborasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, kelompok pemuda, dan lembaga pendidikan tinggi di Kota Banjar dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon.

Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah

1. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi, pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Orientasinya mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Wacana demokrasi memungkinkan sebuah proses demokrasi secara prosedural terjadi dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia yakni pemilu. Proses pelaksanaan pemilu menjadi indikator utama, karena dalam proses inilah pelaksanaan demokrasi secara nyata terjadi. Melalui pemilu berkala, sirkulasi kekuasaan politik dapat terdistribusi secara teratur. Dengan keteraturan ini, kekuasaan politik yang ada tidak kemudian menjadi tetap melainkan terus berganti dalam jangka waktu atau periode yang ditentukan.

Pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Taniredja (2014 : 11) mengemukakan bahwa :

Pemilihan umum sebagai berikut: Pemilihan umum merupakan realisasi kedaulatan rakyat. Rakyat berhak menentukan pemerintahan, oleh karenanya harus dipilih wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat, yang dapat membawa aspirasi rakyat, sehingga wakil-wakil rakyat ini harus rakyat sendirilah yang menentukan/memilih, dengan cara pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat (Harahap, 2016:18).

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkada merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia. Momen pilkada bisa menjadi tolak ukur dalam menilai seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban politiknya. Partisipasi yang dibentuk melalui pilkada bisa dilihat melalui keikutsertaannya dalam partai politik, pencalonan diri dalam pilkada, serta partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemilihan.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) adalah salah satu bentuk mekanisme rakyat dalam membangun struktur dan kultur kehidupan berpolitik yang demokratis. Demokrasi dengan pemilu adalah seperti halnya suatu gerbong kereta yang bersama-sama dalam menuju kearah yang ideal, cita-cita demokrasi antara lain mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam proses politik dan pemerintahan. Artinya, kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas atau wewenang sebuah pemerintahan. Adapun hak partisipasi dan wujud kehendak rakyat sebagai cermin sebuah demokrasi, dapat diwujudkan melalui pemilu. Itulah sebabnya salah satu pilar utama demokrasi adalah terselenggaranya pemilu yang bebas, adil dan bersifat periodik. Fungsi pemilu disini adalah untuk merealisasikan hak partisipasi dan kehendak rakyat dalam pemerintahan, sekaligus agar pemerintahan hasil pemilu tersebut mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat sebagai pemegang kedudukan Negara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara telah meletakkan kedudukan berada ditengah rakyat diwujudkan melalui pengembangan sistem politik, dan sistem pemerintah

Pemilihan langsung diyakini ada kekuatan lain selain mesin partai politik yang punya adil besar mempengaruhi keputusan akhir didalam bilik surat, yaitu kekuatan *figure/citra* kadidat. Kekuatan ini, terkait erat dengan masalah popularitas kadidat. Biasanya seorang kadidat yang diusung partai politik yang memperoleh surat terbanyak kalah karena dia tidak cukup populer dalam masyarakat. Dengan demikian, timbul asumsi bahwa dalam model pemilihan langsung menempatkan bahwa kekuatan *figure* (citra kadidat) memiliki pengaruh yang lebih dahsyat bahkan mengalahkan mesin politik (konstituen partai). Akan tetapi, belajar dari dua kali pilpres langsung di Jawa Timur, asumsi itu rupanya tidak sepenuhnya terbukti. Keberhasilan Yudhoyono yang memenangi dua kali pilpres di Jawa Timur tidak terlepas dari keberhasilan mereka memanfaatkan kekuatan figur dan kendaraan partai politik yang ada.

Membahas terkait Pemilu, tidak lepas dari suara dan aspirasi, aspirasi masyarakat merupakan bagian dari indikator implementasi penyelenggara pemilihan kekuasaan oleh rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum. Masyarakat dan pemilu adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan yang mana masyarakat merupakan faktor utama dan penentu jalan suksesnya pemilu. Aspirasi dari masyarakat terjadi karena adanya pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat yang memengaruhi respon politik pada diri seseorang, atau disebut sebagai preferensi politik. (Yossimelinda. 2019) Preferensi politik juga dapat dipahami sebagai pilihan seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan aktivitas

yang seseorang lakukan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menentukan pilihannya tidaklah sama dengan yang lainnya, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor dari nilai ideologi, agama, dan kultur. Preferensi juga merupakan sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi, yang mana diartikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, dan kegunaan yang ada.

Salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah perilaku pemilih dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan, perilaku pemilih dalam pemilihan umum sangat menentukan legitimasi terhadap partai atau Kepala Daerah yang akan berkuasa. Perilaku pemilih dalam Pilkada ini yang disebut dengan partisipasi politik, dimana masyarakat terlibat dalam kegiatan pilkada, seperti kampanye, sosialisasi dan menggunakan hak pilih. Kaitan antara Pilkada dengan partisipasi politik masyarakat ini sangat penting, dimana keberhasilan Pilkada ditentukan oleh keaktifan masyarakat untuk terlibat didalamnya.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pilkada tentu menunjukkan perilaku yang berbeda-beda atau disebut dengan perilaku pemilih. Ada pemilih yang terlibat aktif dalam kegiatan Pilkada atas pertimbangan rasional mereka, ada pemilih yang terlibat karena kebutuhan psikologinya dari hasil pilkada tersebut, serta adapula pemilih yang terlibat dalam kegiatan Pilkada karena adanya pengaruh dari lingkungan terdekat.

Selain itu, perilaku pemilih juga bisa ditunjukkan dengan aktif atau tidaknya seorang pemilih dalam setiap tahapan Pilkada. Pemilih yang berperilaku aktif adalah mereka yang terlibat dalam seluruh kegiatan Pilkada mulai dari kampanye, menjadi tim sukses, sosialisasi hingga memberikan hak pilihnya, sedangkan pemilih yang pasif adalah mereka yang hanya datang pada saat pemungutan suara atau bahkan tidak menggunakan suaranya sama sekali.

Perilaku pemilih merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau masyarakat untuk memenangkan pilihannya yang dianggap mampu untuk memimpin daerahnya untuk lebih maju. Terpilihnya seorang kandidat idealnya harus memenuhi standar yang diinginkan pemilih, dimana pemilih akan menentukan pilihannya didasarkan atas seberapa besar kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau kelompok pemilih. Dinamika masyarakat saat ini cenderung lebih rasional dalam menyikapi dan menentukan pilihan, meskipun tidak dipungkiri masih terdapat pemilih yang emosional dan tradisional.

Perilaku memilih masyarakat menjadi suatu tolak ukur untuk melihat aktifitas pengambilan keputusan oleh masyarakat terhadap kandidat calon kepala daerah. Perilaku

memilih dalam Pilkada dapat dilihat dari jenis pemilih seperti; pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih apatis. Perilaku memilih dan jenis pemilih terhadap pilihannya bermanfaat untuk menilai eksistensi demokrasi lokal melalui penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini pemilih rasional yang terbentuk pada basis perilaku memilih dengan pemilih-pemilih yang cerdas serta pendekatan pilihan rasional dan pertimbangan untung rugi terhadap visi-misi dan potensi kandidat.

Menurut Setiadi (2013 : 157) menyatakan bahwa :

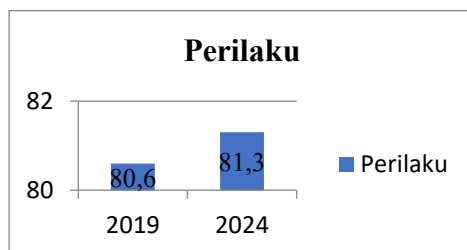
...perilaku memilih masyarakat tidak dapat ditebak kemana suara rakyat dalam setiap kali pemilihan, baik pemilu legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah sangat sulit. Artinya, ada distabilisasi sikap dan perilaku politik rakyat antara hari ini dan hari esok. Begitu juga dengan perilaku pemilih masyarakat, tidak dapat dipastikan kemana suara rakyat.

Kesuksesan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sangat terkait dengan model-model perilaku pemilih yang ikut memengaruhi hasil pemilihan. Karena dengan perilaku pemilih masyarakat baik berdasarkan model sosiologi, psikologi, dan rasional maupun secara tradisional dapat memberi pengaruh dalam menentukan calon legislatif mana yang akan berhasil menjadi pemimpin.

Perilaku pemilih menjadi sorotan utama dalam Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, terlihat adanya *trend* yang menarik perhatian dan proyeksi hasil yang menjadi perbincangan hangat. Melalui proses demokrasi ini, masyarakat mengamati dengan cermat perilaku pemilih yang berkembang di tingkat daerah, termasuk pergeseran kekuatan politik, strategi kampanye yang digunakan oleh calon, serta faktor-faktor penentu yang mempengaruhi preferensi pemilih. Perilaku pemilih tidak hanya mencakup pertarungan antarpolisi politik, tetapi juga menyelami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi dinamika politik setempat. Dengan demikian, pemantauan terhadap *trend* dan proyeksi hasil Pilkada Serentak 2024 menjadi penting dalam memahami arah politik dan potensi perubahan di tingkat daerah.

Perilaku pemilih yang menampilkan beragam tren menarik dan proyeksi hasil yang menantang. Dalam konteks ini, terjadi pergeseran dinamika kekuasaan di beberapa wilayah, dengan partai politik yang kuat di tingkat nasional berusaha memperluas basis dukungan mereka di tingkat lokal. Terdapat juga pertarungan sengit antara kandidat petahana yang mencoba mempertahankan posisinya dan calon baru yang menawarkan perubahan.

Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari KPU Kota Banjar diketahui adanya peningkatan perilaku pemilih jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2024 dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 1. Perilaku Perilaku Pemilih pada Pilkada di Kota Banjar Tahun 2019 dan Tahun 2024
Sumber : KPU Kota Banjar, 2024

Berdasarkan data dari garfik 1.1 terlihat bahwa adanya peningkatan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar dalam bentuk partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,6 namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah sebesar 81,3. Salah satu tren menarik pada Pilkada Serentak 2024 adalah meningkatnya isu-isu lokal seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan menjadi fokus utama dalam kampanye Pilkada. Calon-calon kepala daerah berlomba-lomba untuk menghadirkan solusi konkret bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, sehingga menarik perhatian pemilih.

Pemilihan kepala daerah di Kota Banjar 2024 diikuti oleh Paslon dari berbagai kalangan bukan hanya dari tokoh politik. Total ada empat paslon yang akan berebut kursi Wali Kota Banjar. Paslon nomor urut 1 adalah Nana Suryana dan Mujamil. Paslon ini diusung oleh PDI Perjuangan dan PPP. Kemudian nomor urut 2 ada Akhmad Dimiyati dan Alam Alatas (Alam Mbah Dukun) dari jalur perseorangan. Kemudian paslon nomor urut 3 yakni Sudarsono dan Supriana diusung Partai Golkar dan Partai PKB. Terakhir ada paslon nomor urut 4 Bambang Hidayat dan Dani Danial Mukhlis diusung 6 partai politik, yakni Gerindra, Hanura, PKS, Demokrat, NasDem dan PAN.

Banyaknya calon walikota tentunya akan mempengaruhi perilaku politik pemilih. Pada umumnya popularitas dan citra politik yang positif yang telah terbangun pada lingkungan masyarakat menjadi faktor utama kemenangan pasangan calon, popularitas dan citra politik yang positif tidak terbangun dengan sendirinya, namun dapat tercipta dengan berbagai faktor seperti dukungan mesin partai politik pengusung, ekspos dan

keberpihakan media, popularitas calon dimata pemilih serta pengenalan visi dan misi calon yang dapat membentuk opini pemilih.

Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa adanya beberapa faktor yang menyebabkan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

- Kurangnya pendekatan rasional dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian tawaran program dari pasangan calon untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Contohnya : Kurangnya informasi tentang program kerja yang digagas oleh pasangan calon yang disampaikan kepada pemilih sehingga pemilih kesulitan dalam menentukan pilihannya.
- Adanya perilaku pemilih kritis dalam menentukan pilihannya pada pasangan calon sehingga pemilih dalam menentukan pasangan calon hanya didasarkan pada nilai ideologis yang jadikan pijakan pasangan calon. Contohnya : Kurangnya berbagai pendekatan yang dilakukan untuk menarik simpati para pemilih kepada pasangan calon walikota di Kota Banjar.
- Masih adanya perilaku pemilih tradisional dalam menentukan pilihannya pada pemilihan kepala daerah di Kota Banjar sehingga banyak pemilih yang hanya melihat pigur dari kedua pasangan calon. Contohnya : Kurangnya kerjasama antara partai pengusung dalam mensosialisasikan pasangan calon kepada pemilih sehingga kurang memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- Masih adanya pemilih skeptis dalam melakukan pemilihan kepala daerah di Kota Banjar sehingga pemilih tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan pasangan calon. Contohnya : Pemilih hanya berpartisipasi karena beranggapan siapapun yang menang tidak akan membawa ke arah perubahan yang diharapkan.

Berdasarkan indikator masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perilaku pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjar”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Perilaku menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata

lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu.

Syafhendry, (2016:43), menyatakan bahwa :

Perilaku pemilih saat ini sering diklasifikasikan sebagai pemilih yang bersifat rasional atau tidak rasional. Hal ini terlihat dari kurangnya konsumsi informasi yang berasal dari sumber yang kredibel oleh sebagian besar masyarakat, yang kemudian dapat menghasilkan persepsi yang cenderung dipengaruhi oleh opini publik semata.

Menurut Firmanzah (dalam Efriza, 2012:483) menjelaskan mengenai empat perilaku pemilih yang antara lain sebagai berikut :

- **Pemilih Rasional**

Pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada ‘policyproblem-solving’ dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya. Program kerja ini dapat dianalisis dari dua sisi yaitu kemampuan dimasa lalu dan tawaran program yang akan mengatasi permasalahan saat ini dan masa yang akan datang.

- **Pemilih Kritis**

Pemilih ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai atau kandidat dalam menyelesaikan permasalahan dan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses menjadi pemilih ini bisa dimulai dengan menentukan kandidat mana yang dipilih kemudian mengkritisi segala program kerja yang dicanangkan atau mengkritisi terlebih dahulu kemudian menentukan mana yang menjadi pilihan.

- **Pemilih Tradisional**

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu mementingkan program kerja yang ditawarkan. Pemilih tradisional sangat mementingkan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran memilih suatu partai politik atau kandidat. Salah satu karakteristik pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

- **Pemilih Skeptis**

Jenis pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kandidat, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Kalaupun berpartisipasi saat pemilihan mereka hanya memilih secara acak tanpa didasarkan apapun.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2018:6) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Informan dalam penelitian ini adalah Perwakilan dari Parpol pemenang pemilu, Perwakilan dari KPU Kota Banjar, Perwakilan dari BAWASLU Kota Banjar, Perwakilan dari Media, Perwakilan pelajar di Kota Banjar, Perwakilan mahasiswa di Kota Banjar dan Perwakilan masyarakat umum di Kota Banjar sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Pemilih Rasional

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pemilih rasional belum menunjukkan hasil yang optimal karena dari dua indikator yang diteliti yaitu perilaku pemilih yang didasarkan pada kinerja pasangan calon di masa lalu dan perilaku pemilih yang didasarkan pada tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada keduanya belum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan oleh pemilih. Hal ini dikarenakan masih dominannya faktor-faktor non-rasional seperti ikatan emosional, kedekatan personal dengan calon, pengaruh tokoh masyarakat, serta pertimbangan identitas sosial dan budaya. Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik masyarakat menyebabkan ketidakmampuan dalam menganalisis dan membandingkan kualitas kinerja serta relevansi program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Kurangnya transparansi dan penyampaian program secara menyeluruh oleh pasangan calon, serta minimnya forum diskusi publik yang mendorong pemilih berpikir kritis, juga turut menjadi penyebab utama. Akibatnya, preferensi pemilih lebih bersifat pragmatis dan instan, sehingga menghambat terciptanya perilaku pemilih yang rasional dan berorientasi pada substansi serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurut Firmanzah (2012:485), menyatakan bahwa :

Pemilih rasional merupakan individu yang mengambil keputusan politik berdasarkan pertimbangan logis dan analitis terhadap berbagai informasi yang tersedia. Pemilih jenis ini tidak serta-merta menentukan pilihannya berdasarkan ikatan emosional, identitas kelompok, atau popularitas calon semata, melainkan lebih menekankan pada evaluasi terhadap kinerja calon, tawaran program kerja, serta kemampuan calon dalam menyelesaikan masalah yang nyata di masyarakat.

Dengan demikian adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori tersebut pada dimensi pemilih rasional dengan indikatornya perilaku pemilih didasarkan pada kinerja dari pasangan calon dimasa lalu dan perilaku pemilih di dasarkan pada tawaran program dari pasangan calon untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar pemilih dalam praktiknya tidak menjadikan kinerja maupun tawaran program sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan politik. Sebaliknya, pemilih lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, identitas sosial, kedekatan personal, popularitas calon, serta intensitas kampanye yang bersifat simbolik dan tidak substantif. Selain itu, rendahnya literasi politik, minimnya akses informasi yang objektif dan komprehensif, serta budaya politik pragmatis yang masih kuat di tengah masyarakat turut memperkuat dominasi perilaku non-rasional ini. Dengan demikian, meskipun secara teoritis pemilih rasional diharapkan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan substansi program atau rekam jejak, dalam kenyataannya banyak pemilih belum mencapai tingkat kedewasaan politik tersebut, sehingga hasil penelitian tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka teoritik pemilih rasional.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemilih rasional menunjukan bahwa perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik belum sepenuhnya dilandasi oleh pertimbangan yang rasional. Hal ini tercermin dari dua indikator utama, yaitu perilaku pemilih yang didasarkan pada kinerja pasangan calon di masa lalu dan perilaku pemilih yang didasarkan pada tawaran program pasangan calon untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang keduanya belum menjadi dasar dominan dalam pengambilan keputusan oleh pemilih. Sebagian besar pemilih masih menunjukkan kecenderungan untuk memilih berdasarkan faktor emosional, kedekatan personal, identitas kelompok, atau pengaruh lingkungan sosial, alih-alih menilai secara objektif kinerja dan kualitas program pasangan calon. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi pemilih rasional belum optimal, dan diperlukan upaya peningkatan literasi politik serta penyediaan informasi

politik yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik agar masyarakat mampu membuat keputusan yang lebih rasional dalam proses pemilu.

Pemilih kritis

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pemilih kritis belum menunjukkan tingkat optimalitas yang diharapkan karena dari dua indikator yang diteliti, yaitu perilaku pemilih yang didasarkan pada nilai ideologis sebagai pijakan pasangan calon dan perilaku pemilih yang didasarkan pada ketertarikan terhadap program kerja yang ditawarkan pasangan calon, keduanya belum menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pemilih. Hal ini terjadi karena pemilih masih kurang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ideologis serta kurangnya kesadaran untuk menilai program kerja secara kritis dan objektif. Selain itu, dominasi budaya politik pragmatis yang lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dan hubungan personal turut menghambat pembentukan sikap kritis yang ideal. Faktor lain seperti keterbatasan akses informasi yang transparan dan edukasi politik yang belum merata juga menjadi kendala signifikan dalam mendorong perilaku pemilih yang benar-benar kritis dan berlandaskan nilai ideologis serta isi program yang substansial.

Menurut pendapat Firmazah (2012:487) menyatakan bahwa :

Pemilih kritis adalah individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap proses politik dan mampu melakukan evaluasi secara rasional terhadap calon pemimpin maupun program-program yang ditawarkan. Pemilih kritis tidak mudah terpengaruh oleh pencitraan, propaganda politik, atau janji-janji populis yang tidak berdasar. Mereka justru menuntut kejelasan visi, misi, dan strategi implementasi program kerja, serta mempertanyakan kapasitas dan rekam jejak pasangan calon secara objektif.

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori pada dimensi pemilih kritis, khususnya pada indikator perilaku pemilih yang didasarkan pada nilai ideologis sebagai pijakan pasangan calon serta perilaku pemilih yang didasarkan pada ketertarikan terhadap program kerja yang ditawarkan pasangan calon. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilih belum mampu menginternalisasi nilai-nilai ideologis secara mendalam dan kurang memahami secara kritis isi serta manfaat program kerja yang disampaikan. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah dominasi budaya politik pragmatis, di mana pemilih lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek, kedekatan personal, atau tekanan kelompok sosial daripada evaluasi yang rasional dan berbasis nilai ideologis maupun program substansial. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi

yang transparan dan edukasi politik yang belum merata juga menghambat pemilih untuk bertindak secara kritis dan rasional sesuai dengan teori.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi pemilih kritis menunjukkan bahwa perilaku pemilih belum sepenuhnya didasarkan pada nilai ideologis maupun ketertarikan terhadap program kerja pasangan calon. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih masih kurang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan kritis terhadap aspek-aspek tersebut dalam proses pengambilan keputusan politik. Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan politik, minimnya akses informasi yang komprehensif, serta dominasi budaya politik pragmatis menjadi penghambat utama dalam terciptanya perilaku pemilih yang kritis dan rasional.

Pemilih Tradisional

Dengan demikian diketahui bahwa dimensi pemilih tradisional dengan indikator perilaku pemilih didasarkan pada orientasi tinggi pada ideologi sehingga mengutamakan kebijakan pasangan calon dan perilaku pemilih didasarkan pada figur dan kepribadian pasangan calon telah sesuai dengan keadaan pemilih di Kota Banjar. Hal ini mencerminkan perilaku pemilih yang memiliki karakteristik pemilih tradisional yang lebih mengutamakan kesetiaan terhadap nilai-nilai dan identitas kelompok serta kecenderungan untuk memilih berdasarkan kedekatan personal atau citra calon, daripada evaluasi terhadap program dan kebijakan yang ditawarkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Firmanzah (2012:488) menjelaskan bahwa :

Perilaku pemilih tradisional ditandai oleh kecenderungan memilih berdasarkan faktor sosiologis, seperti kedekatan emosional, ikatan kekerabatan, kesamaan etnis, agama, atau loyalitas terhadap partai tertentu, tanpa mempertimbangkan kinerja atau kapabilitas calon secara objektif.

Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori pada dimensi pemilih tradisional, khususnya pada indikator perilaku pemilih yang didasarkan pada orientasi tinggi terhadap ideologi sehingga mengutamakan kebijakan pasangan calon, serta perilaku pemilih yang didasarkan pada figur dan kepribadian pasangan calon. Hal ini dikarenakan pemilih tradisional cenderung mengutamakan kesetiaan terhadap nilai-nilai dan identitas kelompoknya serta memiliki kecenderungan memilih berdasarkan kedekatan personal atau citra calon. Selain itu, budaya politik yang kuat dan keterbatasan akses informasi membuat pemilih sulit untuk mengevaluasi secara objektif program kerja calon, sehingga aspek ideologis dan figur calon menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi pemilih tradisional menunjukkan bahwa perilaku pemilih lebih dipengaruhi oleh orientasi tinggi pada nilai-nilai ideologis dan figur atau kepribadian pasangan calon daripada pada evaluasi terhadap kebijakan atau program kerja calon. Hal ini menggambarkan bahwa pemilih tradisional cenderung setia pada kelompok identitas dan lebih mengutamakan aspek personal dalam pengambilan keputusan politik.

Pemilih skeptis

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pemilih skeptis belum optimal karena dari dua indikator yang diteliti, yaitu perilaku pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan pasangan calon serta perilaku pemilih yang hanya berpartisipasi karena beranggapan bahwa siapapun yang menang tidak akan membawa perubahan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan rendahnya keterikatan ideologis dan tingginya rasa skeptisisme pemilih terhadap efektivitas kepemimpinan calon terpilih, sehingga berdampak pada partisipasi politik yang kurang kritis dan kurang bermakna.

Menurut pendapat Firmanzah (2012:489), menyatakan bahwa :

Perilaku pemilih skeptis muncul karena rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, partai, maupun kandidat yang bersaing dalam pemilu. Pemilih skeptis cenderung menganggap bahwa proses politik telah dipenuhi oleh kepentingan elite dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara nyata. Oleh karena itu, meskipun mereka tetap berpartisipasi dalam pemilu, partisipasi tersebut sering kali tidak didasari oleh harapan akan adanya perbaikan atau perubahan, melainkan sekadar bentuk keterpaksaan atau formalitas.

Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori pada dimensi pemilih skeptis, khususnya pada indikator perilaku pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan pasangan calon serta perilaku pemilih yang hanya berpartisipasi karena beranggapan bahwa siapapun yang menang tidak akan membawa perubahan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya keterikatan ideologis dan tingginya rasa skeptisisme pemilih terhadap efektivitas kepemimpinan calon terpilih menjadi faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik yang kurang kritis dan kurang bermakna.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemilih skeptis menunjukkan bahwa pemilih cenderung kurang memiliki orientasi ideologi yang kuat terhadap pasangan calon dan sering kali hanya berpartisipasi dalam pemilihan dengan sikap skeptis, beranggapan bahwa siapapun yang menang tidak akan membawa perubahan signifikan. Kondisi ini

mengindikasikan rendahnya kepercayaan dan motivasi pemilih untuk melakukan evaluasi kritis serta berperan aktif dalam proses demokrasi secara bermakna.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar masih belum optimal sesuai dengan empat perilaku hal ini dibuktikan dari 4 dimensi dan 8 indikator yang dijadikan alat ukur dalam melakukan penelitian terdapat 4 indikator yang belum optimal yaitu pada dimensi pemilih rasional dengan indikatornya perilaku pemilih didasarkan pada kinerja dari pasangan calon dimasa lalu dan perilaku pemilih di dasarkan pada tawaran program dari pasangan calon untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta pada dimensi pemilih kritis indikatornya perilaku pemilih didasarkan pada nilai ideologis yang jadikan pijakan pasangan calon dan perilaku pemilih didasarkan pada ketertarikan dengan program kerja yang ditawarkan pasangan calon.

Adanya hambatan-hambatan dalam perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar yang antara lain akses informasi yang tidak merata sehingga masyarakat hanya mendapatkan informasi politik dari media sosial yang tidak terverifikasi atau sekadar mengikuti narasi yang dibawa oleh tim sukses. Debat publik, materi visi-misi, atau *platform* kampanye berbasis program kurang tersebar secara luas dan tidak menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi realitas yang sulit dihindari, di mana bantuan langsung atau janji tertentu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan calon. Hal ini memperkuat budaya politik transaksional dan melemahkan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebagian pemilih menyatakan bahwa mereka merasa kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya, di mana janji-janji politik tidak terpenuhi. Kekecewaan ini menimbulkan sikap skeptis terhadap seluruh calon yang bertarung. Meskipun tetap datang ke TPS, mereka tidak benar-benar mempercayai bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin yang berbeda dari sebelumnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan partai politik masih belum menyentuh aspek pemahaman substansial tentang kualitas calon, hak politik warga, dan peran masyarakat dalam demokrasi lokal. Pendidikan pemilih yang ada lebih bersifat prosedural dan formal, belum menysasar pada pembentukan sikap politik kritis dan rasional.

Menghadapi berbagai hambatan yang menghambat terbentuknya perilaku pemilih yang rasional, kritis, dan partisipatif, sejumlah upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Banjar. Upaya-upaya tersebut antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melaksanakan program pendidikan pemilih melalui penyuluhan langsung ke

masyarakat, terutama di desa-desa dan lingkungan padat penduduk. KPU juga melibatkan relawan demokrasi (relasi) untuk menyampaikan informasi terkait mekanisme pemilu, visi-misi pasangan calon, serta pentingnya memilih berdasarkan program, bukan sekadar iming-iming materi. Adanya kolaborasi sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, kelompok pemuda, dan lembaga pendidikan tinggi di Kota Banjar turut mengambil peran dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Mereka mengadakan diskusi publik, seminar, serta simulasi pemilu yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap kritis dan analitis dalam memilih calon pemimpin.

Selain itu baik KPU maupun Bawaslu Kota Banjar telah mengencarkan kampanye anti-politik uang melalui spanduk, media sosial, dan pelibatan tokoh agama dan adat. Kampanye ini mengedepankan pesan bahwa integritas pemilu bergantung pada pilihan yang bebas dan bertanggung jawab, bukan pada pemberian materi sesaat. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu melalui saluran aduan yang disediakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perilaku pemilih dalam pemilihan Wali Kota Banjar tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih di Kota Banjar masih didominasi oleh kecenderungan pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan sebagai berikut :

Perilaku pemilih rasional dalam pemilihan walikota Banjar tahun 2024 masih kurang optimal hal ini dikarenakan pemilih dalam menentukan pilihan pada pasangan calon walikota kurang didasarkan pada kinerja dari pasangan calon dimasa lalu selain itu pemilih dalam menentukan pilihannya kurang didasarkan pada tawaran program dari pasangan calon untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya sehingga masih banyaknya pemilih yang menentukan pilihannya didasarkan pada ikut-ikutan jika kebanyakan dilingkungannya memilih pasangan calon.

Perilaku pemilih kritis dalam pemilihan walikota Banjar tahun 2024 masih kurang optimal hal ini dikarenakan pemilih dalam menentukan pilihan pada pasangan calon walikota kurang didasarkan pada nilai ideologis yang jadikan pijakan pasangan calon selain itu kurang didasarkan pada ketertarikan dengan program kerja yang ditawarkan pasangan calon karena adanya kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya didasarkan pada informasi yang diperoleh dari orangtuanya maupun dari lingkungannya.

Perilaku pemilih tradisional dalam pemilihan walikota Banjar tahun 2024 telah sesuai dengan kondisi pemilih karena pemilih dalam menentukan pilihan pada pasangan calon walikota tidak didasarkan pada orientasi tinggi pada ideologi sehingga tidak mengutamakan kebijakan pasangan calon selain itu perilaku pemilih dalam menentukan pilihan pada pasangan calon walikota tidak didasarkan pada figur dan kepribadian pasangan calon namun lebih cenderung pada manfaat yang dirasakan secara langsung untuk pemilih.

Perilaku pemilih skeptis dalam pemilihan walikota Banjar tahun 2024 telah sesuai dengan kondisi pemilih karena pemilih dalam menentukan pilihan pada pasangan calon walikota tidak didasarkan pada orientasi ideologi cukup tinggi dengan pasangan calon serta Perilaku pemilih hanya berpartisipasi karena beranggapan siapapun yang menang tidak akan membawa ke arah perubahan yang diharapkan.

Adanya hambatan-hambatan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjar yang antara lain akses informasi yang tidak merata sehingga masyarakat hanya mendapatkan informasi politik dari media sosial yang tidak terverifikasi atau sekadar mengikuti narasi yang dibawa oleh tim sukses. Debat publik, materi visi-misi, atau platform kampanye berbasis program kurang tersebar secara luas dan tidak menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi realitas yang sulit dihindari, di mana bantuan langsung atau janji tertentu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan calon serta pengalaman masa lalu sehingga sebagian pemilih merasa kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya, di mana janji-janji politik tidak terpenuhi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan terbentuknya perilaku pemilih yang rasional, kritis, dan partisipatif, sejumlah upaya telah dilakukan yang antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar melaksanakan program pendidikan pemilih melalui penyuluhan langsung ke masyarakat, terutama di desa-desa dan lingkungan padat penduduk. KPU juga melibatkan relawan demokrasi (relasi) untuk menyampaikan informasi terkait mekanisme pemilu, visi-misi pasangan calon, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memilih berdasarkan program, bukan sekadar iming-iming materi dengan mengencarkan kampanye anti-politik uang melalui spanduk, media sosial, dan pelibatan tokoh agama dan adat. Melakukan kolaborasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, kelompok pemuda, dan lembaga pendidikan tinggi di Kota Banjar dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Regi Refian Garis, S.IP., M.Si., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dan Bapak II Sujai, SIP., M.Si., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Artikel ini adalah benar-benar karya ilmiah yang saya susun berdasarkan kemampuan yang saya miliki, dan segala isi yang terdapat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2019). *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, I. A. (2023). Dinamika perilaku politik masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. *Journal Publicuho*, 6(4), 1–12.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2012). *Political explore: Sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, S. (2012). Dinamika politik lokal menjelang Pilukada Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Harahap, H. (2015). Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Harahap, R. R. (2016). Perilaku politik masyarakat dalam Pemilu. *JOM FISIP*, 3(2), 1–8.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pradhanawati. (2015). *Pilkada langsung: Tradisi baru demokrasi lokal*. Semarang: KOMPIP.

Santoso, T., dkk. (2014). *Penegakan hukum pemilu: Praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Setiawan, A. (2015). *Gelombang demokrasi ketiga*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Simatupang, Y. (2024). Dinamika politik dan Pilkada di Kota Kendari: Analisis pengaruh media sosial dalam kampanye politik lokal. *Journal Publicuho*, 7(1), 10–20.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, J., & Limakrisna, N. (2017). *Petunjuk praktis penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi* (Edisi ke-3). Jakarta: Mitra Wacana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yossimelinda. (2019). *Preferensi politik pemilih milenial dalam Pilkada Kota Padang tahun 2018* [Skripsi, Universitas Andalas]. Universitas Andalas.